



Vol. 12 No. 2 Mei 2025

e-ISSN: 2986-8289; p-ISSN: 2986-707X, Hal 204-213

DOI: <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>Available online at: <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>

Kewirausahaan Pariwisata sebagai Motor Penggerak Desa Wisata: Studi Kasus Desa Wisata Egon Buluk, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rosalina Andriyani Ebang Pareira^{1*}, Michael Rudolfus Sawu²

Politeknik Cristo Re

email: andriyanipareira@gmail.com

Abstract.

Community-based tourism is intended to make the community both the subject and the object of tourism development. High community participation reflects the success of community-based tourism development. This study aims to propose a development direction to encourage social change in the context of regional tourism. The scope of analysis includes the development of tourism product components and the level of local community participation. A qualitative method with a case study approach was used to examine community-based tourism development. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and literature review. Data analysis was conducted using qualitative thematic analysis. This study found that community-based tourism development has not progressed significantly, local community participation remains low, and there is a lack of synergy among stakeholders. This study contributes to the theoretical framework for the future direction of community-based tourism development.

Keywords: *Community participation, tourism development, community-based tourism, development direction*

Abstrak.

Pariwisata berbasis masyarakat dimaksudkan agar masyarakat menjadi subjek sekaligus objek dalam pembangunan pariwisata. Tingginya partisipasi masyarakat mencerminkan keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan arah pengembangan guna mendorong perubahan sosial dalam lingkup pariwisata daerah. Cakupan analisis meliputi pengembangan komponen produk pariwisata dan tingkat partisipasi masyarakat lokal. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis tematik kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan pariwisata berbasis komunitas belum berjalan secara signifikan, partisipasi masyarakat lokal masih minim, dan terdapat kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Studi ini memberikan kontribusi terhadap kerangka teoritis dalam arah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat kedepan.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, pengembangan pariwisata, pariwisata berbasis masyarakat, arah pengembangan

1. LATAR BELAKANG

Pariwisata berbasis masyarakat dimaksudkan agar masyarakat menjadi subjek sekaligus objek dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya pariwisata yang mereka miliki. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan merasakan secara langsung dampak dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pengelolaannya. Istilah masyarakat mengacu pada konsep organisme sosial yang berupaya mencapai manfaat kolektif, dan diarahkan oleh pemerintah untuk pembangunan (Helena dkk., 2022).

Pariwisata berbasis masyarakat telah menjadi salah satu agenda dalam pengembangan pariwisata daerah. Harapannya, kehadiran pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Desain pengembangan pariwisata di Kabupaten Sikka menggunakan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat. Pemerintah secara aktif mendorong pengembangan desa wisata sebagai inkubator bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif. Melalui desa wisata, masyarakat lokal tidak hanya menjadi sasaran atau tujuan pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku utama. Hal ini karena masyarakat lokal memiliki aset sumber daya pariwisata dan akan merasakan langsung dampak dari pembangunan tersebut.

Kabupaten Sikka merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang melimpah, mencakup daya tarik alam, budaya, dan buatan. Pemerintah daerah telah memiliki desain besar pengembangan pariwisata yang memetakan berbagai daya tarik wisata untuk dikembangkan. Namun demikian, hanya sedikit destinasi yang telah dikembangkan karena rendahnya pemberdayaan masyarakat lokal, yang berakibat pada kurangnya tenaga kerja dan keterampilan dalam pengembangan destinasi wisata. Kondisi ini mencerminkan situasi sosial yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Para peneliti berpendapat bahwa pendekatan partisipatif dari masyarakat lokal sangat diperlukan untuk membuka jalan bagi pengembangan pariwisata.

Desa Wisata Egon Buluk menjadi salah satu wadah pengembangan kewirausahaan pariwisata. Menariknya, desa ini dikembangkan menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata partisipatif. Namun demikian, masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki karena hasil partisipasi masih minim. Ini merupakan fakta penting yang perlu didiskusikan guna meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Saat ini, partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata masih rendah. Padahal, partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengembangan pariwisata sangat krusial untuk mencapai pembangunan pariwisata

berkelanjutan. Konsep partisipasi masyarakat bersifat sangat ideologis karena mencerminkan keyakinan tentang bagaimana masyarakat seharusnya dikelola (Wondirad dkk., 2020). Oleh karena itu, para peneliti berpendapat bahwa pembaruan sistem pengembangan pariwisata diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam menentukan bagaimana pembangunan seharusnya dijalankan.

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, diketahui bahwa potret permasalahan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata mencakup keterbatasan modal ekonomi, sumber daya manusia, dan kemitraan. Selain itu, belum adanya sistem kepariwisataan yang mapan sehingga menjadikan pencapaian pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berkualitas tinggi selalu menjadi tantangan. Ini merupakan permasalahan serius yang tengah dihadapi dalam mengembangkan destinasi wisata pedesaan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini guna mendorong pertumbuhan pariwisata pedesaan kedepannya.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti berpendapat bahwa pengembangan komponen produk pariwisata dan tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata perlu didiskusikan lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk merumuskan model kolaboratif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di masa depan. Proyek pariwisata berbasis masyarakat seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di desa-desa wisata.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pariwisata

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan pariwisata untuk menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang inklusif (Duxbury & Richards, 2019). Tingkat partisipasi masyarakat dibagi menjadi 3 yaitu tokenisme: Keterlibatan simbolis (misalnya, konsultasi tanpa tindak lanjut); kemitraan: Kolaborasi setara antara masyarakat, pemerintah, dan swasta (Rasoolimanesh et al., 2021) dan pemberdayaan penuh: Masyarakat sebagai pemimpin pengambilan keputusan (Tolkach & King, 2020). Partisipasi masyarakat dalam pariwisata juga dibagi menjadi beberapa bentuk yakni partisipasi digital yaitu pemanfaatan media sosial untuk promosi wisata berbasis komunitas (Kurniawan et al., 2022); partisipasi masyarakat berbasis ekonomi yaitu melalui kepemilikan usaha homestay, UMKM kuliner, atau atraksi budaya dan

partisipasi masyarakat berbasis ekowisata yaitu partisipasi dalam konservasi alam dan pariwisata berkelanjutan (Su et al., 2021). Manfaat partisipasi masyarakat antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu daerah melalui pendapatan langsung, untuk memperkuat ketahanan pariwisata pasca krisis misalnya pasca pandemic dan untuk mengurangi konflik sumber daya atau menciptakan lapangan kerja dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan destinasi (Li et al., 2023).

Partisipasi Masyarakat Dalam Kewirausahaan Pariwisata

Dampak industri pariwisata dianggap signifikan, terutama terkait pengaruhnya terhadap masyarakat lokal (Mostafa dkk., 2020). Partisipasi masyarakat lokal dalam pariwisata merupakan kekuatan positif untuk perubahan dan katalisator pembangunan (Ali dkk., 2022). Selain itu, partisipasi masyarakat dapat membantu memaksimalkan manfaat sosial ekonomi dari pariwisata (Gannon dkk., 2021). Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam pengelolaan karena mereka akan secara langsung merasakan manfaat maupun dampaknya (Sawu dan Sugiarti, 2020). Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kelangkaan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal disebabkan oleh ketidakhadiran pemerintah daerah di wilayah pedesaan dalam yurisdiksinya. Pemerintah daerah gagal membentuk tata kelola masyarakat, menciptakan ruang tata kelola multilevel, serta menghubungkan daerah-daerah ini dengan jaringan pengetahuan dan investasi (misalnya universitas, LSM, dan investor) yang dapat membantu pelaku lokal dalam memanfaatkan peluang ekonomi (Rocca dan Zielinski, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji fenomena pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Egon Buluk. Salah satu tantangan dalam pariwisata berbasis masyarakat adalah terbatasnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Ruang lingkup penelitian ini mencakup komponen produk pariwisata dan partisipasi masyarakat lokal dan arah pengembangan kedepan. Peneliti berperan sebagai instrumen manusia dalam pengumpulan data. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan kajian pustaka. Informan kunci dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak seperti: perangkat desa, pengelola desa wisata, tokoh masyarakat, pelaku usaha pariwisata lokal, dinas pariwisata). Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan metode tematik kualitatif dengan tahapan yang terdiri dari: mengidentifikasi, mengorganisasi, menganalisis, dan mengusulkan pola hubungan antar tema.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan wirausaha pariwisata

Destinasi wisata harus memiliki daya tarik yang kuat untuk menarik kunjungan wisatawan. Keberadaan daya tarik wisata merupakan salah satu faktor yang memengaruhi fenomena perjalanan wisata. Para peneliti berpendapat bahwa hal ini merupakan awal dari motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan. Daya tarik mencakup keunikan, keindahan, dan nilai dari berbagai keragaman alam maupun budaya yang terdapat di destinasi wisata. Oleh karena itu, ketahanan daya tarik wisata perlu dijaga melalui operasional pariwisata yang bertanggung jawab. Keunikan destinasi merupakan aset penting bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan di masa depan. Kekayaan sumber daya pariwisata ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna mengurangi angka kemiskinan.

Desa wisata Egon Buluk memiliki keberagaman daya tarik wisata alam. Keberagaman tersebut terdiri dari air terjun meang miak, agrowisata, kolam air dingin dan panas alam. Chandra dan Sawu (2024) menyebutkan bahwa kondisi daya tarik wisata tersebut sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan belum memiliki sistem manajerial yang efektif. Wisatawan baik lokal, nasional dan internasional biasanya berkunjung pada akhir pekan (Sawu dan Ridla, 2024). Wirausaha pariwisata juga telah bertumbuh untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Diantaranya adalah 5 homestay, layanan informasi pariwisata melalui website jadesta. Selain itu, didukung dengan fasilitas lainnya di spot daya tarik wisata.

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan produk pariwisata sangat bervariasi dalam konteks dimensi sosial budaya, sosial ekonomi, dan lingkungan. Pada dimensi sosial budaya, partisipasi masyarakat lokal terlihat dari penataan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, kebersihan lingkungan, dan penghijauan di lokasi-lokasi setempat. Secara empiris, wisatawan dan pengunjung memang mulai berdatangan secara perlahan dengan skala kecil, namun keterlibatan mereka masih jarang dan bersifat sporadis. Hal ini disebabkan oleh belum siapnya destinasi dalam memenuhi kebutuhan wisatawan, serta minimnya promosi dan pemasaran yang dilakukan. Dalam konteks ekonomi, terlihat bahwa partisipasi masyarakat lokal masih sangat rendah. Kegiatan kewirausahaan lokal belum berkembang, baik secara individu maupun kolektif. Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang dapat dilampirkan oleh peneliti:

“Desa kami sudah mulai dikunjungi wisatawan. Biasanya anak-anak muda yang datang. Kami sudah mulai menata daya tarik wisata, fasilitas, dan juga kebersihan lingkungan. Tapi untuk usaha pariwisata skala kecil masih terbatas. Usaha yang ada kebanyakan hanya jualan

kebutuhan harian.”

Pengembangan fasilitas pariwisata masih minim untuk memenuhi kebutuhan wisatawan saat mengunjungi destinasi wisata. Padahal, komponen fasilitas memiliki peran yang sangat penting. Hal ini karena fasilitas pariwisata merupakan elemen vital yang tidak dapat dipisahkan dari destinasi wisata. Fasilitas pariwisata berperan sebagai bagian dari komponen produk pariwisata dan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keberlanjutan pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pariwisata sangat krusial untuk merespons permintaan pasar wisatawan untuk beraktivitas di destinasi.

Pengembangan fasilitas pariwisata tersebut dilakukan oleh masyarakat lokal. Namun, status kepemilikan fasilitas ini bersifat individual maupun komunal. Pada dasarnya, fasilitas yang ada dikembangkan dengan modal individu. Kontribusi dari pemangku kepentingan eksternal sangat minim, baik dari segi jumlah maupun jenis bantuan. Bantuan dari pihak luar biasanya berupa gazebo dan beberapa fasilitas untuk aktivitas wisata pantai lainnya. Pengembangan fasilitas ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan lokal milik masyarakat, meskipun beberapa di antaranya juga menggunakan material dari luar. Tenaga kerja dalam pembangunan fasilitas pariwisata ini sepenuhnya berasal dari masyarakat lokal itu sendiri. Berikut kutipan wawancara yang dapat dilampirkan oleh peneliti:

“Kami sendiri yang mengembangkan fasilitas wisata ini. Setelah itu, memang ada bantuan dari pihak luar. Dalam pembangunan fasilitas ini, kami menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di sini, sambil bekerja sendiri juga.”

(wawancara dengan masyarakat lokal, 2024).

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menangani berbagai isu penting yang muncul dalam setiap inisiatif pengembangan dan keberlanjutan pariwisata. Kebijakan ini mencerminkan tujuan dan strategi yang diadopsi oleh pemerintah terkait pembangunan pariwisata dan ekonomi. Kebijakan pariwisata mencakup berbagai aspek, termasuk sosial ekonomi, sosial lingkungan, dan sosial budaya. Di Kabupaten Sikka, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dikategorikan ke dalam klaster kepulauan dan daratan. Kebijakan pengembangannya diarahkan untuk meningkatkan perekonomian lokal dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Berikut adalah kutipan wawancara dengan pihak pemerintah yang dapat dilampirkan oleh peneliti:

“Secara spasial, ini cukup menarik karena berada dalam zona penyangga konservasi. Kami

fokus mengembangkan pariwisata sesuai dengan potensi yang ada. Sejauh ini, pariwisata sudah mulai tumbuh secara bertahap di wilayah ini.”

(wawancara dengan pemerintah, 2024).

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kewirausahaan pariwisata

Masyarakat pedesaan memiliki motivasi yang tinggi untuk memperoleh manfaat finansial dari pengembangan pariwisata. Melalui pendekatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, diversifikasi ekonomi di wilayah ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara empiris, ekonomi lokal selama ini bergantung pada sektor pertanian. Masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak untuk meningkatkan kualitas hidupnya, karena tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah ini. Saat ini, masyarakat mulai berpartisipasi dalam inisiatif pengembangan wisata pedesaan dengan mendirikan homestay dan layanan produk makanan dan minuman. Selain itu, mulai muncul pekerjaan baru seperti pemandu wisata (*tour guide*) dan resepsionis yang dikelola langsung oleh masyarakat. Namun, kondisi ini masih terbatas dan memerlukan perbaikan serta penguatan di masa mendatang. Berikut kutipan wawancara dengan warga lokal yang dapat dilampirkan oleh peneliti:

“Kami berharap pariwisata ini bisa membawa manfaat bagi kami karena kami punya potensi wisata dan sudah banyak orang yang datang ke sini. Selama ini, kami sudah mengembangkan beberapa produk untuk melayani wisatawan yang datang.”

(wawancara dengan masyarakat lokal, 2024).

Dari sudut pandang peluang, wilayah ini menunjukkan potensi besar karena kebijakan pemerintah saat ini sangat mendukung pengembangan pariwisata sebagai pendekatan untuk menciptakan ekonomi pedesaan yang baru. Destinasi pedesaan diidentifikasi sebagai wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Secara spasial, kebijakan ini diarahkan secara strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi besar dari aset pariwisata yang dimiliki. Pada level makro, model yang didorong adalah pariwisata yang ramah terhadap masyarakat (*community-friendly tourism*), yang memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk mengembangkannya. Namun demikian, dalam implementasinya, terdapat tantangan berupa terbatasnya kapasitas masyarakat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Berikut adalah kutipan wawancara dengan pemerintah yang dapat dilampirkan oleh peneliti:

“Program-program kami sebagai turunan dari kebijakan pengembangan pariwisata

memberikan ruang yang luas bagi masyarakat. Kami juga sangat mendorong pertumbuhan destinasi wisata baru di masa mendatang. Kami berharap pariwisata bisa memberikan manfaat bagi masyarakat lokal."

(wawancara dengan pemerintah daerah, 2024).

Arah Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Kedepannya

Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan setiap tujuan pembangunan pariwisata. Masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama, dan keterlibatan mereka telah menjadi semacam "hukum sosial" dalam pembangunan pariwisata. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa pengelolaan pariwisata tidak dapat berjalan secara efektif tanpa keterlibatan masyarakat. Dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat lokal merupakan pemangku kepentingan sekaligus pemilik sumber daya pariwisata, serta memahami dampak dari aktivitas pariwisata di destinasi, maka mereka perlu ditempatkan sebagai pusat dalam pengelolaan pariwisata. Berdasarkan temuan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sikka masih tergolong rendah, peneliti mengusulkan peningkatan partisipasi tersebut ke tahap selanjutnya sebagai solusi teoritis.

Peneliti mencoba menguraikan strategi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat lokal melalui konsep pemberdayaan komunitas guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Diharapkan, kolaborasi para pemangku kepentingan mampu memberdayakan masyarakat sesuai potensi dan kebutuhan mereka. Upaya ini bertujuan menciptakan energi positif dalam komunitas agar lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Kolaborasi ini diharapkan membuka ruang bagi keterlibatan stakeholder dalam membangun kapasitas masyarakat lokal sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, LSM, akademisi, dan sektor swasta terbukti memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi pedesaan, lingkungan, dan keberlanjutan (Roxas dkk., 2020). Kolaborasi diartikan sebagai kerja sama antar pemangku kepentingan untuk mengatasi isu-isu pariwisata sesuai dengan aturan, norma, dan struktur yang disepakati bersama.

Klasterisasi bisnis pariwisata merupakan bentuk struktur kolaborasi yang menguntungkan dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah. Secara praktis, keterlibatan stakeholder dalam pembentukan klaster sangat penting, karena hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dan mengatasi tantangan yang muncul secara kolektif di antara para pemangku kepentingan selama

proses kolaborasi, serta untuk mendukung peran masing-masing pihak (Potthoff dkk., 2023). Daya saing destinasi pariwisata sangat erat kaitannya dengan sumber daya destinasi, manajemen destinasi, permintaan pasar, dan kondisi situasional (Zehrer dan Hallmann, 2015)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa daya tarik wisata alam yang tersedia sangat menarik, khususnya pasar wisata minat khusus. Namun, sistem pengelolaannya belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata lokal masih perlu ditingkatkan serta kurangnya modal dalam pengelolaan produk pariwisata itu sendiri. Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah melalui pelatihan, evaluasi, dan pembiayaan agar dapat menghasilkan capaian yang baik. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata juga masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengaruh dari faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat lokal tersebut. Peneliti bermaksud memberikan gagasan mengenai integrasi antara faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat lokal dengan tingkat partisipasi masyarakat lokal sebagai hasil akhir. Pengambil kebijakan perlu menyediakan skema pemberdayaan bagi masyarakat lokal guna meningkatkan kapasitas dalam memajukan pariwisata. Arah pengembangan kedepan diperlukan untuk memberikan skema kerja konseptual bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan pariwisata pedesaan. Implikasi dari penelitian ini adalah pembentukan klaster pengembangan destinasi berdasarkan kapasitas pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di destinasi pedesaan

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. B., Quaddus, M., Rabbanee, F. K., & Shanka, T. (2022). Community Participation and Quality of Life in Nature-Based Tourism: Exploring The Antecedents and Moderators. In *Journal of Hospitality and Tourism Research* (Vol. 46, Issue 3). <https://doi.org/10.1177/1096348020980094>
- Chandra, M. H., & Sawu, M. R. (2024). Sustainable Social Entrepreneurship Tourism Development Model in Rural Destination of Sikka District, East Nusa Tenggara Province. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 4(04), 1708-1720.
- Gannon, M., Rasoolimanesh, S. M., & Taheri, B. (2021). Assessing the Mediating Role of Residents' Perceptions toward Tourism Development. *Journal of Travel Research*, 60(1), 149–171. <https://doi.org/10.1177/0047287519890926>
- Helena, L., Rocca, D., & Zielinski, S. (2022). Community-based tourism , social capital , and governance of post-conflict rural tourism destinations : the case of Minca , Sierra Nevada de Santa. *Tourism Management Perspectives*, 43(June), 100985. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100985>

- Mostafa, R. S., Sundari, R., Michael, H. C., Kourosh, E., & Siamak, S. (2020). A systematic scoping review of sustainable tourism indicators in relation to the sustainable development goals. *Journal of Sustainable Tourism*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1775621>
- Realino, D., Pareira, R. A. E., & Pertywy, Y. A. (2024). Pengaruh Kualitas Pengalaman terhadap Niat Mengunjungi Kembali Dimediasi oleh Emosi Positif (Studi Pada Budi Sun Resort Maumere). *Jurnal Projemen UNIPA*, 11(3), 19-31. <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>
- Rocca, L. H. D., & Zielinski, S. (2022). Community-based tourism, social capital, and governance of post-conflict rural tourism destinations: the case of Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Tourism Management Perspectives*, 43(January), 100985. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100985>
- Rudolfus Sawu, M., & Pramita Sugiarti, D. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Community Based Tourism di Desa Wisata Waturaka, Kabupaten Ende. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(1), 119. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2020.v08.i01.p16>
- Sawu, M. R., & Ridla, M. (2024). Tourist engagement model of regenerative tourism destinations: A case study of Egon Buluk tourism village, Sikka Regency, East Nusa Tenggara province. *Journal of Global Hospitality and Tourism*, 3(1), 35-46.
- WONDIRAD, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism Management*, 78. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104024>
- Duxbury, N., & Richards, G. (2019). European cultural tourism: A discourse on community participation and governance. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 17(3), 1-18. <https://doi.org/10.1080/14766825.2019.1631193>
- Tolkach, D., & King, B. (2020). Strengthening community-based tourism in a post-pandemic era. *Tourism Geographies*, 23(3), 1-22. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1833971>
- Rasoolimanesh, S. M., Ramakrishna, S., Hall, C. M., Esfandiar, K., & Sharif, S. P. (2021). Community participation in tourism development: A systematic literature review. *Tourism Management Perspectives*, 39, 100831. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100831>
- Dangi, T. B., & Jamal, T. (2022). An integrated approach to sustainable community-based tourism. *Sustainability*, 14(6), 1-20. <https://doi.org/10.3390/su14063456>
- Li, Y., Hu, X., & Zhang, L. (2023). Digital platforms and rural tourism: Empowering local communities. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(2), 1-19. <https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2153167>
- Su, M. M., Wall, G., & Xu, K. (2021). Community participation in ecotourism: Evidence from China. *Journal of Ecotourism*, 20(2), 1-18. <https://doi.org/10.1080/14724049.2021.1928010>